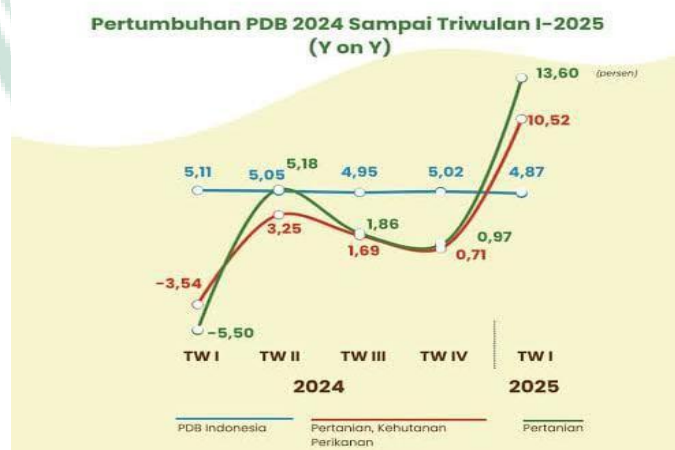


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, serta pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), sektor ini menyumbang sekitar 12,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 29% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini sejalan dengan laporan Katadata (2024) yang menyebutkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional dibandingkan sektor lainnya. Pemerintah terus berupaya memperkuat sektor ini melalui berbagai program seperti subsidi pupuk, peningkatan kapasitas petani, serta penerapan sistem kartu tani untuk mewujudkan transparansi dalam distribusi bantuan pertanian (Kementerian Pertanian RI, 2025). Di tingkat daerah, peran sektor pertanian juga terlihat signifikan, di mana kontribusi pertanian Jawa Tengah terhadap PDB nasional meningkat pada awal tahun 2025 (Jatengprov.go.id, 2025).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan PDB 2024 samapai Triwulan I-2025

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2025) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif selama tahun 2024 hingga Triwulan I tahun 2025. Pada awal tahun 2024, sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar $-5,50\%$, kemudian mulai meningkat pada triwulan kedua dengan pertumbuhan $3,25\%$, meskipun kembali melemah pada triwulan ketiga dan keempat masing-masing menjadi $1,69\%$ dan $0,71\%$. Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2025, sektor pertanian mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan mencapai $13,60\%$, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar $4,87\%$. Peningkatan tajam ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan aktivitas pertanian nasional, terutama di subsektor tanaman pangan dan perkebunan yang didukung oleh stabilitas pasokan pupuk, peningkatan produktivitas, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan pertanian.

Fluktuasi kinerja sektor pertanian menunjukkan bahwa efektivitas distribusi bantuan dan pengelolaan anggaran sangat berpengaruh terhadap stabilitas produksi nasional (BPS, 2024). Menurut laporan Kementerian Pertanian (2025), peningkatan pertumbuhan pada awal tahun 2025 dipicu oleh perbaikan sistem distribusi pupuk dan bantuan benih. Namun, beberapa penelitian dan laporan audit menyebutkan bahwa transparansi pencatatan dan akuntabilitas penggunaan dana publik masih menjadi tantangan utama dalam sektor ini (Kemenkeu, 2024).

Permasalahan seperti ketidaktepatan pencatatan transaksi, keterlambatan penyusunan laporan keuangan, dan lemahnya dokumentasi administrasi masih sering ditemukan di berbagai instansi publik, termasuk di tingkat kecamatan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah (2024) mencatat adanya penyimpangan pengelolaan dana sebesar Rp96,2 miliar serta kelemahan sistem pengendalian intern pada beberapa perangkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang ada

belum sepenuhnya berjalan efektif, dan pengendalian internal belum berfungsi optimal dalam mencegah kesalahan maupun kecurangan yang dapat mengurangi tingkat akuntabilitas keuangan publik (BPK RI, 2024).

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi publik terhadap pengelolaan dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam sektor pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya sebatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup transparansi informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta keandalan data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas keuangan adalah kewajiban entitas publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dengan cara menyajikan laporan keuangan yang transparan, relevan, dan dapat dipercaya. Ketika akuntabilitas tidak terwujud, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah akan menurun, dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi sulit dievaluasi secara objektif. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan publik, sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut, suatu sistem diperlukan yang mampu menjamin ketepatan, keandalan, serta kelengkapan informasi keuangan. Salah satu instrumen penting yang mendukung akuntabilitas adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan rangkaian sumber daya yang meliputi manusia, prosedur, dan teknologi, yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah data transaksi keuangan menjadi informasi relevan bagi pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2018). Dalam konteks instansi pemerintah, SIA berperan strategis sebagai instrumen utama untuk mencapai akuntabilitas keuangan, yakni pertanggungjawaban atas pemanfaatan anggaran

publik secara transparan, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia terus mendorong pengoptimalan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi sebagai elemen reformasi pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menekankan penyajian laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan standar internasional. Melalui implementasi SIA yang efektif, instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan mutu pengelolaan dan pelaporan keuangan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara semakin kokoh. Untuk memastikan fungsi SIA berjalan optimal, dukungan pengendalian internal diperlukan agar setiap proses akuntansi dilaksanakan sesuai prosedur dan terhindar dari kesalahan atau penyimpangan.

Pengendalian internal merupakan komponen penting dalam menjaga keandalan sistem keuangan dan memastikan setiap transaksi dicatat sesuai dengan prosedur yang berlaku. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2017) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dalam sektor publik, pengendalian internal berfungsi sebagai sistem pertahanan pertama untuk mencegah penyimpangan, kesalahan pencatatan, maupun kecurangan yang dapat menurunkan tingkat akuntabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan seluruh instansi pemerintah, termasuk lembaga pelatihan pertanian, untuk menerapkan pengendalian internal yang mencakup lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penerapan kelima unsur ini diharapkan dapat menjamin keteraturan, ketepatan, dan keandalan laporan keuangan di lingkungan instansi pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI 2024) melaporkan bahwa banyak instansi pemerintah daerah di Jawa Tengah masih memiliki kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terutama pada aspek pemantauan dan kegiatan pengendalian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan keuangan yang berdampak pada menurunnya transparansi dan akuntabilitas publik. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur merupakan salah satu instansi yang menghadapi permasalahan dan tantangan serupa, di mana pelaksanaan pengendalian internal belum berjalan secara optimal, khususnya dalam hal pemantauan kegiatan serta pembagian tanggung jawab keuangan antar unit kerja.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, beroperasi sebagai unit kerja di bawah Dinas Pertanian dan memainkan peran penting dalam pengembangan pertanian di tingkat kecamatan. Tugasnya meliputi penyediaan layanan penyuluhan, penyelenggaraan pelatihan, pengelolaan data dan informasi pertanian, serta fasilitasi program pemerintah seperti distribusi bantuan dan pupuk bersubsidi. Selain itu, tanggung jawab atas akuntabilitas dan transparansi diemban melalui dokumentasi administrasi dan penyusunan laporan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberdayaan kelompok tani untuk mencapai kemandirian dan adopsi teknologi pertanian modern secara berkelanjutan.

Akuntabilitas laporan keuangan sangat penting di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur, karena dana publik dikelola untuk program strategis seperti pelatihan petani, distribusi pupuk bersubsidi, dan penyaluran bantuan sarana produksi pertanian. Akuntabilitas yang memadai tercermin dalam laporan keuangan yang disusun tepat waktu, lengkap, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, hambatan seperti keterlambatan pelaporan, pencatatan manual yang belum terintegrasi, dan pengawasan internal yang lemah terhadap akurasi data masih sering dijumpai. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem pelaporan efektif, implementasi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang efisien, serta pengendalian internal yang kuat, agar transaksi keuangan dapat dipantau, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara memadai. Meski demikian, tantangan dalam implementasi SIA termasuk keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan prosedur yang belum kuat menyebabkan pengendalian internal belum berfungsi maksimal, sehingga akuntabilitas laporan keuangan kurang optimal dan pertanggungjawaban atas anggaran publik belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur, ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Observasi awal tersebut dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan administrasi dan keuangan di BPP Kecamatan Dayeuhluhur serta pengamatan langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Hasil observasi menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem keuangan berbasis teknologi, belum optimalnya penerapan prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan, serta lemahnya pelaksanaan pengendalian internal yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pengendalian internal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas serta akuntabilitas laporan keuangan pada instansi sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Sintiani (2023) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal mampu meningkatkan ketepatanwaktuan serta keandalan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Hasil penelitian Farwitawati dan Arini (2025) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi serta sistem pengendalian internal berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lembaga publik. Temuan serupa juga disampaikan oleh Simamora et al. (2021) dan Nispa Sari *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa

penerapan sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintahan desa.

Sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Penelitian Rahayu (2020) mengungkapkan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan dan kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan. Penelitian Sari (2022) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan sulit tercapai apabila penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal tidak dilaksanakan secara konsisten. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada setiap instansi dapat berbeda, tergantung pada kondisi organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan.

Keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), khususnya pada tingkat kecamatan, masih menjadi celah dalam kajian akademik. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada instansi pemerintah daerah, rumah sakit, maupun pemerintahan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian yang berfokus pada lembaga penyuluhan pertanian masih relatif terbatas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pengendalian internal dijalankan serta bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Penerapan SIA di BPP memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel. Tantangan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengendalian internal masih perlu dikaji

secara lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana penerapan SIA dan pengendalian internal dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur serta bagaimana peran keduanya dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pada instansi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pengelolaan keuangan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur?
2. Bagaimana penerapan pengendalian internal dalam mendukung keandalan dan ketepatan laporan keuangan di BPP Kecamatan Dayeuhluhur?
3. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pengendalian internal berperan dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di BPP Kecamatan Dayeuhluhur?
4. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan SIA dan pengendalian internal, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses pengelolaan keuangan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur.
2. Untuk mengetahui dan menilai bagaimana pengendalian internal diterapkan dalam mendukung keandalan serta ketepatan penyusunan laporan keuangan di BPP Kecamatan Dayeuhluhur.
3. Untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan SIA dan pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di lingkungan BPP.
4. Untuk mengungkap berbagai tantangan dan kendala dalam penerapan SIA dan pengendalian internal, serta merumuskan solusi dan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di BPP Kecamatan Dayeuhluhur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pada instansi pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konsep akuntabilitas keuangan dalam konteks lembaga publik, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara efektivitas penerapan SIA, sistem pengendalian internal, dan tingkat akuntabilitas laporan keuangan di sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Dayeuhluhur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPP Kecamatan Dayeuhluhur dalam meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pengendalian internal. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan untuk memperbaiki prosedur pencatatan, pelaporan, serta pengawasan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, BPP dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga serta memastikan pengelolaan dana program pertanian berjalan efisien dan sesuai dengan prinsip good governance.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga pertanian terkait dalam menyusun kebijakan yang mendukung peningkatan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam memperkuat pengawasan internal dan sistem akuntansi di satuan kerja perangkat daerah agar tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan SIA dan pengendalian internal pada instansi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang akuntansi sektor publik dan menjadi acuan untuk pengembangan penelitian yang sejenis di masa mendatang.